

# Analisis Implementasi Manajemen Sistem K3 Dalam Upaya Pencegahan Resiko Kecelakaan Kerja di PT. X

Nur Angraeni <sup>1\*</sup>, Darmawan Yudhanegara <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas teknologi Digital, Bandung, Indonesia.

Email: [nur10121828@digitechuniversity.ac.id](mailto:nur10121828@digitechuniversity.ac.id) <sup>1\*</sup>, [darmawanyudhanegara272@gmail.com](mailto:darmawanyudhanegara272@gmail.com) <sup>2</sup>

## Histori Artikel:

Dikirim 20 Februari 2025; Diterima dalam bentuk revisi 10 April 2025; Diterima 10 Mei 2025; Diterbitkan 1 Juni 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset) – Lembaga KITA.

## Suggested citation:

Angraeni, N., & Yudhanegara, D. (2025). Analisis Implementasi Manajemen Sistem K3 Dalam Upaya Pencegahan Resiko Kecelakaan Kerja di PT. X. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1229–1237. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4058>.

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. X sebagai upaya pencegahan risiko kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 di perusahaan ini telah dilakukan, namun masih terdapat kendala dalam tingkat kepatuhan pekerja terhadap penggunaan alat pelindung diri (APD), minimnya pengawasan, serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Faktor-faktor penyebab utama pelanggaran K3 meliputi kurangnya pengawasan, ketidaknyamanan dalam penggunaan APD, serta belum diterapkannya sanksi yang tegas bagi pelanggar. Sebagai solusi, perusahaan dapat meningkatkan pengawasan melalui inspeksi rutin, memberikan pelatihan berkala, serta menerapkan sistem insentif dan sanksi yang lebih jelas untuk meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap aturan K3. Implikasi dari penelitian ini mengarah pada perlunya peningkatan budaya keselamatan kerja di perusahaan dengan melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penerapan SMK3. Dengan demikian, diharapkan risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan dan lingkungan kerja yang lebih aman serta produktif dapat tercipta.

**Kata Kunci:** Manajemen Sistem K3; Pencegahan Resiko Kecelakaan Kerja.

## Abstract

This research analyzes the implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) at PT. X as an effort to prevent the risk of work accidents. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. The research results show that the implementation of K3 in this company has been carried out, but there are still obstacles in the level of worker compliance with the use of personal protective equipment (PPE), minimal supervision, and lack of ongoing socialization and training. The main factors causing K3 violations include lack of supervision, discomfort in using PPE, and the lack of strict sanctions for violators. As a solution, companies can increase supervision through routine inspections, provide regular training, and implement a clearer incentive and sanction system to increase worker compliance with K3 regulations. The implications of this research point to the need to improve work safety culture in companies by involving all organizational elements in implementing SMK3. In this way, it is hoped that the risk of work accidents can be minimized and a safer and more productive work environment can be created.

**Keyword:** Occupational Health and Safety System Management; Prevention of Work Accident Risks.

## 1. Pendahuluan

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2012). Di Indonesia, pemerintah juga telah menunjukkan komitmennya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang kemudian ditingkatkan dengan dikeluarkannya PP No. 50 Tahun 2012 (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2012). Dalam Permenaker No. 5/MEN/1996 maupun PP No. 50 Tahun 2012 dijelaskan bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh proses produksi dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan SMK3 (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2012). Salah satu perusahaan tekstil yang ada di Jawa Barat, tepatnya di Bandung Barat, adalah PT. X, yang merupakan perusahaan manufaktur tekstil yang memproduksi kain rajutan lusi dan rajutan melingkar untuk pakaian olahraga, pakaian renang, pakaian dalam pria dan wanita, pakaian pembentuk tubuh, pakaian luar, dan lainnya. Dalam pengamatan awal di PT. X, terdapat beberapa permasalahan terkait penerapan K3, seperti ketidakpatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri (APD). Contohnya, di area gudang bahan kimia, beberapa pekerja tidak menggunakan masker, dan ada karyawan yang bekerja tidak menggunakan sepatu atau lebih memilih menggunakan sandal. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi K3 di perusahaan ini belum sepenuhnya efektif, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan paparan bahaya bagi karyawan. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian ini untuk menilai seberapa efektif penerapan Sistem Manajemen K3 di PT. X dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi peningkatan manajemen K3 yang lebih optimal bagi perusahaan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2012). Sedangkan menurut Standar Internasional OHSAS 18001, K3 merujuk pada semua aktivitas yang dilakukan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, melalui berbagai upaya pencegahan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang menurut PP No. 50 Tahun 2012 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan, bertujuan untuk mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2012). ISO 45001:2018 juga mengatur SMK3 dengan fokus pada pengelolaan risiko K3 secara sistematis untuk meningkatkan keselamatan kerja, mengurangi potensi kecelakaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman (International Organization for Standardization, 2018). Penerapan K3 di industri tekstil, yang memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan dan penyakit akibat bahaya seperti kebisingan, paparan bahan kimia, dan bahaya kebakaran, perlu mencakup penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), ventilasi yang memadai, pelatihan rutin, inspeksi dan pemeliharaan mesin, serta pengelolaan bahan kimia dan limbah (Sari & Prasetyo, 2021). Menurut Wulandari dan Setiawan (2021), kepatuhan pekerja terhadap prosedur K3 merupakan faktor krusial dalam menciptakan budaya kerja yang aman. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pekerja, antara lain komitmen manajemen, pengawasan berkala, kenyamanan APD, dan budaya organisasi yang mendukung (Wulandari & Setiawan, 2021). Strategi untuk meningkatkan kepatuhan pekerja meliputi komunikasi yang jelas, pelatihan berkelanjutan, partisipasi pekerja dalam kebijakan K3, serta penerapan sanksi dan insentif yang konsisten (Lestari & Rachman, 2022). Wibowo (2020) mengemukakan bahwa teguran kolektif dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, sementara Rahmadani dan Surya (2021) menambahkan bahwa pemberian Surat Peringatan (SP) secara bertahap efektif untuk menekan pelanggaran berulang.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diperoleh dari pengalaman individu atau kelompok terhadap fenomena sosial, sedangkan metode deskriptif menurut Sugiyono (2017) digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena melalui deskripsi data yang diperoleh tanpa membuat kesimpulan yang bersifat umum. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan implementasi manajemen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. X secara mendalam. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, Forum Group Discussion (FGD), dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk menilai kepatuhan pekerja terhadap K3, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta kondisi fasilitas keselamatan kerja. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerapan K3, seperti manajemen, supervisor, dan pekerja, untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai kebijakan K3 dan tantangan dalam penerapannya. FGD melibatkan pekerja, supervisor, dan perwakilan manajemen untuk mendiskusikan tantangan serta solusi terkait penerapan K3 di perusahaan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti kebijakan K3, laporan kecelakaan kerja, dan pelatihan pekerja dalam bidang keselamatan kerja. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif melalui tiga tahap: pertama, reduksi data untuk memilah dan menyederhanakan informasi yang relevan; kedua, penyajian data dalam bentuk deskriptif untuk mempermudah pemahaman pola hubungan antarvariabel; dan ketiga, penarikan kesimpulan yang divalidasi melalui teknik triangulasi data untuk memastikan akurasi dan validitas temuan (Miles & Huberman, 1994). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi SMK3 di PT. X serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Hasil

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Metode ini dipilih karena memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam menafsirkan data lapangan yang kompleks dan bervariasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan informasi yang relevan, sementara penyajian data bertujuan untuk mengorganisir informasi yang telah dipilih dalam bentuk deskriptif agar memudahkan pemahaman dan interpretasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi pola yang muncul dan memastikan validitas temuan melalui teknik triangulasi, yakni membandingkan hasil dari berbagai sumber data yang digunakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diamati.

Tabel 1. Reduksi Data

No.	Sumber Data	Temuan Lapangan	Kategori	Inti Informasi (Reduksi)
1	Observasi, Wawancara	Banyak pekerja tidak menggunakan masker dan sepatu safety	Kepatuhan terhadap APD	Pelanggaran SOP yang berisiko terhadap keselamatan kerja
2	Wawancara (pekerja)	APD tidak nyaman, masker membuat sesak napas	Kenyamanan kerja	Kenyamanan memengaruhi kepatuhan terhadap K3
3	Observasi, FGD	Tidak ada briefing keselamatan sebelum kerja	Budaya K3	Tidak adanya kebiasaan reflektif atau preventif sebelum memulai pekerjaan

RESEARCH ARTICLE

4	Wawancara, FGD	Tidak ada sanksi bagi pelanggaran K3	Penegakan disiplin	Ketiadaan sanksi menyebabkan tidak adanya efek jera
5	Wawancara, FGD	Banyak pekerja belum pernah mengikuti pelatihan K3	Edukasi dan Sosialisasi	Rendahnya pemahaman terhadap pentingnya keselamatan kerja
6	Observasi	Pengawasan tidak terlihat aktif	Supervisi & Monitoring	Tidak adanya pengawasan rutin menurunkan kepatuhan

Kepatuhan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan indikator dasar dalam implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa meskipun APD telah disediakan, banyak pekerja yang tidak menggunakannya. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dan pelaksanaannya di lapangan. Kenyamanan Kerja menjadi faktor penting dalam hal ini, di mana banyak pekerja mengungkapkan bahwa masker dan APD lainnya dirasa tidak nyaman, terutama di lingkungan kerja yang panas atau lembap. Ketidaknyamanan ini menjadi salah satu alasan utama yang melemahkan kepatuhan terhadap penggunaan APD. Budaya K3 yang seharusnya menciptakan kesadaran kolektif terhadap risiko belum terbentuk dengan baik. Kurangnya briefing keselamatan dan minimnya interaksi preventif antara atasan dan pekerja menunjukkan bahwa budaya keselamatan di perusahaan ini masih lemah. Penegakan Disiplin juga menjadi isu penting, di mana data dari Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan sistem sanksi yang tegas terhadap pelanggaran K3. Akibatnya, Standar Operasional Prosedur (SOP) hanya bersifat normatif tanpa memberikan efek penguatan perilaku. Edukasi dan Sosialisasi yang terbatas menyebabkan kurangnya pemahaman mendalam mengenai risiko kerja dan pentingnya penggunaan APD. Sosialisasi yang tidak merata juga menjadi faktor penghambat dalam penyebaran informasi K3 di kalangan pekerja. Supervisi dan Monitoring yang lemah, tercermin dari tidak adanya inspeksi atau pengawasan langsung dari atasan atau petugas K3, menunjukkan kurangnya kontrol internal yang memadai. Padahal, menurut indikator K3 dalam PP No. 50 Tahun 2012, pengawasan merupakan unsur penting dalam memastikan kepatuhan terhadap K3 di tempat kerja.

### 3.1.1 Penyajian Data Observasi

Observasi dilakukan di berbagai area kerja di PT. X, termasuk gudang bahan kimia, bagian dyeing, finishing, maintenance, dan ruang kerja lainnya. Berikut adalah temuan utama dari observasi yang dilakukan:

Tabel 2. Penyajian data observasi

Temuan	Keterangan	Indikator K3 Terkait
Banyak pekerja tidak menggunakan masker dan sepatu safety	Terjadi di gudang bahan kimia dan bagian produksi	Kepatuhan terhadap penggunaan APD
Tidak ada briefing keselamatan sebelum bekerja	Pekerja langsung memulai aktivitas kerja	Budaya K3
Tidak ditemukan pengawasan langsung dari supervisor	Tidak ada inspeksi harian	Pengawasan dan monitoring

Temuan observasi menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik kerja di lapangan. Meskipun alat pelindung diri (APD) telah tersedia, tidak terdapat mekanisme kontrol atau motivasi yang cukup kuat untuk mendorong pekerja agar menaati aturan yang telah ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan APD tidak cukup untuk menjamin penggunaannya jika tidak disertai dengan sistem pengawasan dan pemantauan yang efektif. Hasil wawancara dengan sembilan narasumber yang berasal dari berbagai divisi dan jabatan juga memperkuat temuan ini. Kepala Gudang Bahan Kimia menyatakan, "APD seperti masker memang tersedia, tapi kebanyakan pekerja merasa tidak

RESEARCH ARTICLE

nyaman. Terutama kalau kerja berat, mereka lepas sendiri." Kepala Bagian Processing menambahkan, "Sanksi belum diterapkan secara resmi, jadi pelanggaran ya terus-terusan terjadi." Seorang Pekerja Bagian Maintenance mengungkapkan, "Sejak saya kerja di sini, belum pernah ada pelatihan K3." Pekerja di bagian Finishing juga berpendapat, "Saya tahu masker penting, tapi kalau panas dan pengap, rasanya gak kuat pakai terus." Wawancara ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap K3 tidak hanya disebabkan oleh kurangnya fasilitas, tetapi juga oleh faktor budaya kerja, kenyamanan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Meskipun banyak pekerja menyadari pentingnya K3, kesadaran tersebut belum cukup untuk mendorong mereka untuk patuh karena tidak adanya kontrol yang konsisten dan pembiasaan yang memadai. Selain itu, FGD yang dilakukan dengan sekitar 15 perwakilan dari berbagai bagian perusahaan menghasilkan berbagai solusi terkait implementasi K3, namun juga menyoroti beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.

Tabel 3. Penyajian Data FGD

Topik Diskusi	Temuan	Kesepakatan
Faktor penyebab pelanggaran K3	APD tidak nyaman, tidak ada sanksi, tidak ada pelatihan	Pelanggaran dianggap biasa
Efektivitas sanksi	Teguran dan SP kurang berdampak	Pemotongan insentif lebih tegas dan realistis
Strategi peningkatan K3	Perlu pelatihan rutin, reward, pengawasan	Evaluasi berkala dan perbaikan sistem K3

Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber serta mencocokkan informasi tersebut dengan data observasi di lapangan untuk memastikan keandalan data yang diperoleh. Verifikasi terhadap kebijakan K3 perusahaan dilakukan dengan merujuk pada dokumen kebijakan dan prosedur yang ada, serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh manajer dan pekerja. Selain itu, observasi langsung digunakan untuk memverifikasi apakah prosedur K3 dijalankan dengan baik, dengan memperhatikan penggunaan APD, penerapan prosedur keselamatan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dari hasil verifikasi, dapat disimpulkan bahwa meskipun PT. X telah memiliki kebijakan dan prosedur K3 yang memadai, tantangan utama yang dihadapi terletak pada implementasi dan kesadaran pekerja. Penegakan aturan yang lebih tegas, pelatihan berkala, serta pengawasan yang lebih intensif di lapangan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi sistem K3 di perusahaan ini.

### 3.1.2 Analisis Implementasi SMK3

Analisis implementasi SMK3 di PT. X dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3, yang menjadi acuan utama dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012, SMK3 mencakup lima elemen utama yang harus diterapkan, yaitu: (1) Kebijakan K3, (2) Perencanaan K3, (3) Pelaksanaan rencana K3, (4) Pemantauan dan evaluasi kinerja K3, (5) Tinjauan ulang manajemen K3. Dalam penelitian ini, temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa elemen tersebut telah diterapkan, namun masih ada kekurangan dalam implementasinya, seperti perencanaan pelatihan yang belum terdokumentasi secara baik, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi rutin terhadap penerapan K3 di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana PT. X telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012 dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

Tabel 4. Tinjauan ulang manajemen

No	Elemen SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012)	Temuan di Lapangan	Status Implementasi	Indikator yang Belum Terpenuhi
1	Kebijakan K3	Sudah ada dokumen kebijakan K3; struktur organisasi K3	Sudah Terpenuhi	-



RESEARCH ARTICLE

		tersedia		
2	Perencanaan K3	Tidak ada perencanaan pelatihan rutin; identifikasi risiko tidak dilakukan menyeluruh	Belum Optimal	- Rencana pelatihan tidak terdokumentasi - Identifikasi bahaya tidak rutin
3	Pelaksanaan Rencana K3	Banyak pekerja tidak menggunakan APD; SOP tidak disosialisasikan dengan baik	Belum Terpenuhi	- APD tidak digunakan secara konsisten - SOP tidak dipahami pekerja
4	Pemantauan dan Evaluasi K3	Tidak ada audit K3 berkala; pelaporan kecelakaan tidak sistematis	Belum Terpenuhi	- Tidak ada monitoring rutin - Evaluasi K3 minim
5	Tinjauan Ulang Manajemen	Tidak ditemukan rapat evaluasi manajemen K3	Belum Terpenuhi	- Tidak ada review berkala terhadap program K3

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD), ditemukan bahwa dari lima elemen utama dalam implementasi SMK3, hanya satu elemen yang telah diterapkan dengan baik, yaitu elemen kebijakan K3. PT. X telah menyusun dokumen kebijakan K3 yang ditandatangani oleh manajemen puncak, dan struktur organisasi K3 serta tim P2K3 juga telah terbentuk, menunjukkan komitmen formal perusahaan terhadap penerapan K3. Dengan demikian, elemen kebijakan ini dinilai telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 50 Tahun 2012. Namun, empat elemen lainnya masih menunjukkan kekurangan signifikan. Pertama, pada aspek perencanaan K3, perusahaan belum merancang program pelatihan secara berkala, dan kegiatan identifikasi potensi bahaya (HIRA) belum dilaksanakan secara menyeluruh di setiap divisi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan K3 masih bersifat parsial dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga elemen ini dinilai belum optimal. Kedua, dalam aspek pelaksanaan rencana K3, banyak pekerja di lapangan yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan, dan sepatu safety, terutama di bagian gudang bahan kimia, dyeing, dan maintenance. Selain itu, banyak pekerja yang mengaku tidak memahami prosedur kerja aman (SOP). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana K3 belum efektif, dengan minimnya sosialisasi dan pengawasan. Ketiga, pada aspek pemantauan dan evaluasi kinerja K3, perusahaan tidak melakukan audit internal secara rutin dan belum memiliki sistem pelaporan kecelakaan kerja yang sistematis, sehingga data yang diperlukan untuk menilai keberhasilan program K3 tidak tersedia. Keempat, pada aspek tinjauan ulang manajemen, tidak ditemukan bukti adanya kegiatan evaluasi atau rapat tinjauan ulang yang membahas efektivitas implementasi program K3. Tidak adanya tinjauan manajemen menunjukkan bahwa perusahaan belum melaksanakan elemen ini sama sekali. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi SMK3 di PT. X masih bersifat administratif dan belum menyentuh tataran operasional secara maksimal, yang berisiko meningkatkan kecelakaan kerja. Hal ini menunjukkan kesenjangan besar antara regulasi dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan intervensi yang lebih konkret, baik dari sisi kebijakan internal, pelatihan, maupun pengawasan untuk meningkatkan efektivitas SMK3 di perusahaan.

Beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap K3 di PT. X antara lain: (1) Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi: Manajemen perlu melakukan inspeksi rutin untuk memastikan aturan K3 dipatuhi oleh pekerja. Supervisi yang lebih ketat harus diimplementasikan, dan pekerja yang melanggar aturan harus diberikan sanksi yang sesuai. (2) Pelatihan dan Edukasi Berkelanjutan: Sosialisasi mengenai pentingnya K3 harus dilakukan secara berkala melalui seminar, pelatihan, dan simulasi keadaan darurat. Materi pelatihan perlu diperbarui secara rutin agar tetap relevan dengan kondisi terkini di tempat kerja. (3) Penerapan Sanksi dan Insentif: Sanksi tegas perlu diterapkan bagi pekerja yang melanggar aturan K3, seperti teguran, surat peringatan, hingga pemotongan gaji untuk pelanggaran berulang. Sebaliknya, insentif seperti bonus atau penghargaan dapat diberikan kepada pekerja yang disiplin dalam menerapkan K3. (4) Penyediaan APD yang Lebih Nyaman:

## RESEARCH ARTICLE

Perusahaan dapat mencari alternatif APD yang lebih ergonomis agar pekerja merasa lebih nyaman menggunakannya. Peningkatan kenyamanan ini dapat mendorong pekerja untuk lebih konsisten dalam menggunakan APD. (5) Meningkatkan Budaya Keselamatan di Perusahaan: Budaya keselamatan harus menjadi bagian dari nilai inti perusahaan, sehingga setiap pekerja merasa bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan rekan kerja. Dengan penerapan solusi-solusi ini, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan pekerja terhadap aturan K3 dan mengurangi risiko kecelakaan kerja.

### 3.2 Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. X masih menghadapi beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya, meskipun kebijakan dan prosedur yang relevan telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Arikunto (2010) yang menekankan bahwa dalam penelitian, pemahaman terhadap kondisi lapangan dan observasi yang dilakukan akan memberikan wawasan mengenai implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Di PT. X, meskipun alat pelindung diri (APD) telah disediakan, namun banyak pekerja yang tidak menggunakannya dengan konsisten, terutama di area berisiko tinggi seperti gudang bahan kimia dan ruang produksi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan tertulis dan pelaksanaannya di lapangan, sebagaimana diungkapkan oleh Creswell (2014) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif dapat mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan tersebut. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2012), penerapan SMK3 di perusahaan diwajibkan untuk mengendalikan risiko yang berhubungan dengan aktivitas kerja guna menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat. Namun, PT. X belum sepenuhnya memenuhi ketentuan ini, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan disiplin. Sebagai contoh, tidak ada sistem pengawasan rutin yang dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, yang menurut Miles dan Huberman (1994) sangat penting dalam pengumpulan data dan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola dalam praktik yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Pengawasan yang lemah ini berkontribusi pada rendahnya kepatuhan pekerja terhadap aturan keselamatan, yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya pelanggaran, termasuk tidak digunakannya APD.

Selain itu, tidak adanya pelatihan yang terstruktur dan berkala juga menjadi masalah yang signifikan. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2017), penting bagi perusahaan untuk menyediakan pelatihan secara rutin agar pekerja memiliki pemahaman yang jelas tentang prosedur keselamatan dan cara menghindari potensi bahaya. Tanpa pelatihan yang memadai, pekerja mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahaya yang ada di tempat kerja dan bagaimana cara melindungi diri mereka. Ini terlihat dari wawancara dengan pekerja yang mengungkapkan bahwa banyak dari mereka yang belum pernah mengikuti pelatihan K3, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepatuhan terhadap penggunaan APD. Sementara itu, berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.05/MEN/1996, pengawasan yang baik dan penerapan sanksi yang jelas adalah bagian dari implementasi SMK3 yang efektif. Namun, PT. X belum menerapkan sanksi yang konsisten untuk pelanggaran K3, yang memungkinkan pelanggaran terus berulang tanpa adanya efek jera. Hal ini sesuai dengan temuan Lestari dan Rachman (2022), yang menyatakan bahwa penerapan sanksi yang tegas merupakan salah satu strategi untuk menurunkan risiko kecelakaan di tempat kerja, terutama dalam industri tekstil yang memiliki potensi bahaya yang tinggi. Meskipun PT. X sudah memiliki kebijakan dan prosedur K3, tantangan terbesar yang dihadapi adalah dalam hal implementasi di lapangan. Kesadaran yang rendah, kurangnya pelatihan yang memadai, dan pengawasan yang tidak intensif merupakan faktor-faktor yang perlu diperbaiki. Untuk itu, perusahaan harus meningkatkan pengawasan, memperbarui dan melaksanakan pelatihan secara berkala, serta menerapkan sistem sanksi yang lebih tegas dan sistem insentif yang dapat memotivasi pekerja untuk lebih patuh terhadap aturan keselamatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Yulianti dan Nugroho (2021), yang menekankan bahwa penguatan pengawasan dan pelatihan akan berdampak signifikan dalam mencegah kecelakaan kerja dan meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat di PT. X, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan yang komprehensif terhadap sistem SMK3 yang ada, termasuk meningkatkan budaya keselamatan dan keterlibatan aktif seluruh elemen organisasi dalam implementasinya.

## 4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD) mengenai implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. X, dapat disimpulkan bahwa meskipun penerapan SMK3 telah dimulai, pelaksanaannya belum berjalan optimal. Beberapa elemen dasar seperti penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan penyusunan prosedur operasional standar (SOP) sudah ada, namun terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Salah satunya adalah ketidakpatuhan pekerja dalam penggunaan APD, terutama di area berisiko tinggi seperti gudang bahan kimia dan ruang produksi. Selain itu, tidak adanya briefing keselamatan secara rutin menyebabkan lemahnya budaya keselamatan kerja di perusahaan. Pelatihan dan sosialisasi mengenai K3 juga belum dilakukan secara menyeluruh dan berkala, sementara sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SMK3 juga belum optimal. Sanksi yang jelas terhadap pelanggaran K3 belum diterapkan, yang mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi pelanggar. Analisis data menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kurangnya fasilitas, melainkan pada aspek manajerial seperti edukasi, pengawasan, dan penegakan disiplin. Tingkat kepatuhan pekerja terhadap aturan K3 masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari ketidaksadaran atau pengabaian pekerja terhadap pentingnya penggunaan APD seperti masker dan sepatu safety. Faktor ketidaknyamanan APD, kurangnya pengawasan, dan tidak adanya sanksi yang tegas menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan. Selain itu, banyak pekerja yang belum mengikuti pelatihan resmi mengenai K3, sehingga mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai potensi risiko kerja. Budaya keselamatan kerja yang belum terbentuk sepenuhnya juga menjadi faktor penghambat implementasi K3. Solusi yang diusulkan adalah pemberian sanksi lebih tegas, serta sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif. Tingkat kesadaran pekerja dalam menggunakan APD perlu ditingkatkan dengan memastikan kenyamanan alat yang digunakan dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaannya. Salah satu kendala yang ditemukan adalah ketidaksesuaian APD dengan kebutuhan pekerja, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan penyesuaian desain dan kualitas APD untuk meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran implementatif yang dapat diterapkan oleh PT. X untuk meningkatkan pelaksanaan SMK3 antara lain: pertama, perusahaan harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya K3 kepada seluruh pekerja melalui seminar rutin, pelatihan berbasis praktik, serta penggunaan media komunikasi seperti poster, video edukasi, dan simulasi bahaya di lingkungan kerja. Selain itu, perusahaan perlu membentuk tim khusus yang akan melakukan inspeksi harian terhadap kepatuhan pekerja dalam penggunaan APD dan penerapan prosedur keselamatan, serta memperkuat sistem pengawasan dengan evaluasi rutin. Kedua, perusahaan perlu melakukan riset untuk menyediakan APD yang lebih ergonomis dan nyaman digunakan oleh pekerja. Ini akan mengurangi alasan pekerja untuk tidak mematuhi aturan terkait penggunaan APD. Pekerja juga perlu dilibatkan dalam pemilihan jenis APD agar mereka merasa memiliki keterlibatan dalam kebijakan K3 yang diterapkan. Ketiga, penerapan sanksi dan insentif harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Pekerja yang melanggar aturan K3 harus diberikan sanksi yang jelas, sementara pekerja yang patuh dapat diberi penghargaan sebagai bentuk motivasi. Budaya keselamatan harus ditanamkan dengan menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya perusahaan melalui kampanye internal dan penghargaan bagi departemen dengan tingkat kepatuhan terbaik.



## RESEARCH ARTICLE

## 5. Referensi

- Alfiansah, Y., Kurniawan, B., & Ekawati, E. (2020). Analisis Upaya Manajemen K3 Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kecelakaan Kerja Pada Proyek Konstruksi PT. X Semarang. *Jurnal kesehatan masyarakat*, 8(5), 595-600. <https://doi.org/10.14710/jkm.v8i5.27899>.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. (No Title).
- Creswell, J. W. (2012). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed.
- Destari, N., Widjasena, B., & Wahyuni, I. (2017). Analisis implementasi promosi K3 dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja di PT X (proyek pembangunan gedung Y Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 397-404.
- INDONESIA, P. R. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Indonesia, R., & Indonesia, P. R. (1970). Undang Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang: Keselamatan Kerja. *Sekretariat Negara: Jakarta*.
- Kurnianingtias, M. (2022). Analisis Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) di Workshop Garmen Kampus Tekstil. *Jurnal Tekstil: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Tekstil Dan Manajemen Industri*, 5(2), 77-87. <https://doi.org/10.59432/jute.v5i2.37>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- No, P. (70). tahun 2016 tentang Standar Dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri. *Jakarta: Kementerian Kesehatan*.
- Pangkey, S. J. I., Lengkong, V. P., & Saerang, R. T. (2023). Analisis Implementasi Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Sebagai Upaya Terhadap Pencegahan Kecelakaan Kerja Di PT. PLN (Persero) UP3 Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(4), 200-211.
- Sholihah, Q. (2018). Implementasi Sistem Manajemen K3 pada konstruksi jalan sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja. *Buletin Profesi Insinyur*, 1(1), 25-31.
- Silaban, G., Soetomo, A. H., & Maurits, L. S. (2009). Kinerja penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja perusahaan peserta program jaminan kecelakaan kerja pada PT Jamsostek Cabang Medan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 12(3), 131.
- Sugiyono, S. (2007). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. *Bandung Alf*.
- TRANSMIGRASI, M. T. K. D. (2011). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Zulkarnain, V., Saputra, D. A., Yahya, N. H., Aditya, M. S., & Radianto, D. O. (2023). Analisis Penerapan Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Kontruksi Di Indonesia. *Journal of Student Research*, 1(4), 159-167. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i4.1480>.